

Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia

Authors:

Irfan Setiawan, Neova Derenov Budhi Arti

Email:

irfansetiawan@ipdn.ac.id, neovaderenov@gmail.com

Affiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Received : Oktober, 20, 2024

Revised : December, 28, 2024

Accepted : December 28, 2024

Available Online: December 31, 2024

Corresponding author

Irfan Setiawan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

irfansetiawan@ipdn.ac.id

Abstrak

Globalisasi telah menjadi pendorong utama inovasi di sektor pemerintahan Indonesia, terutama dalam digitalisasi pelayanan publik, restrukturisasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan Inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada penerapan teknologi digital, pengelolaan anggaran publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, terkait kondisi inovasi pemerintahan dan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia dengan menggambarkan dengan tepat sifat gejala atau tanda perkembangan selanjutnya dalam hubungan antara obyek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dengan menggunakan data-data online inovasi dan kelembagaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pengembangan e-government, e-budgeting, dan program Smart City untuk memperbaiki transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga berperan penting dalam mendorong inovasi, terutama melalui restrukturisasi kelembagaan yang memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan tuntutan global. Namun, tantangan utama dalam implementasi inovasi ini termasuk ketimpangan akses teknologi antara daerah maju dan tertinggal, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta kesenjangan kompetensi SDM. Novelty artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan keberhasilan inovasi dalam pemerintahan. Dukungan kebijakan, investasi infrastruktur, serta pengembangan SDM di wilayah tertinggal sangat dibutuhkan agar inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Inovasi Pemerintahan, Kelembagaan, Restrukturisasi, Pelayanan Publik,

Abstract

Globalization has become a major driver of innovation in the Indonesian government sector, especially in the digitalization of public services, institutional restructuring, and the implementation of technology-based policies. This article aims to examine the relationship between government innovation and government restructuring in Indonesia, with a focus on the application of digital technology, public budget management, and increasing human resource (HR) capacity. This study uses qualitative analysis with descriptive research methods, related to the condition of government innovation and institutional restructuring in Indonesia by accurately describing the nature of symptoms or signs of further development in the relationship between the research object and other social phenomena using online data on innovation and institutions in Indonesia. The results of the study show that the Indonesian government has made various efforts such as the development of e-government, e-budgeting, and the Smart City program to improve transparency, efficiency, and effectiveness of public services. Bureaucratic reform also plays an important role in driving innovation, especially through institutional restructuring that allows adaptation to local needs and global demands. However, the main challenges in implementing this innovation include the inequality of access to technology between developed and disadvantaged regions, especially in eastern Indonesia, and the gap in HR

competency. The novelty of this article emphasizes the importance of cross-sector collaboration, both at the central and regional levels, to ensure the success of innovation in government. Policy support, infrastructure investment, and human resource development in disadvantaged areas are needed so that innovation can drive inclusive and equitable economic growth throughout Indonesia.

Keywords: Government Innovation, Institutions, Restructuring, Public Services

Pendahuluan

Inovasi pemerintahan telah menjadi topik sentral dalam kajian administrasi publik, terlebih di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin menuntut efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi sektor swasta dan perekonomian semata, tetapi juga memengaruhi pola tata kelola di sektor publik. Melalui penguatan akses terhadap teknologi, arus informasi yang lebih cepat, dan integrasi ekonomi yang kian kompleks (Zheng et al., 2019), pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdorong untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi dalam tata kelola serta struktur kelembagaan. Upaya inovasi ini tidak sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, melainkan juga memicu restrukturisasi kelembagaan untuk memastikan bahwa organisasi pemerintahan dapat merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik dengan lebih fleksibel.

Globalisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Zheng et al. (2019), berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi lintas batas dan pertukaran pengetahuan, yang pada akhirnya mendorong terjadinya inovasi pemerintahan. Banyak negara berkembang mulai mengadaptasi praktik inovatif dari negara-negara maju, khususnya anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang telah lebih dulu mengembangkan kapasitas inovatif. Proses adaptasi ini meliputi kebijakan pemerintah yang berorientasi digital, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Di Indonesia, proses globalisasi ini turut memacu sektor publik untuk lebih terbuka dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Salah satu wujud inovasi yang paling nyata adalah adopsi teknologi informasi dalam pelayanan publik. Menurut Rahayu et al. (2023), berbagai aplikasi digital telah dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Kebijakan ini tidak sekadar meningkatkan efisiensi prosedur administrasi, tetapi juga memberi dampak langsung pada restrukturisasi kelembagaan, di mana banyak unit kerja yang harus menyesuaikan ulang tugas pokok dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi di sektor kependudukan, misalnya, menuntut adanya pembentukan tim khusus yang menangani pengembangan aplikasi, pemeliharaan data, serta keamanan siber.

Selain di perkotaan, inovasi pemerintahan juga diterapkan di daerah-daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti di Kabupaten Karimun (Noeridha, 2023). Penerapan sistem database haji, manajemen surat elektronik, dan aplikasi pengaduan publik di Karimun membuktikan bahwa digitalisasi dan inovasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Efek dari inovasi ini terhadap restrukturisasi kelembagaan sangat signifikan. Satuan kerja daerah yang sebelumnya berfokus pada pelayanan konvensional harus menyesuaikan komposisi pegawai, meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, sekaligus menata ulang proses kerja agar selaras dengan penerapan sistem digital baru. Dengan kata lain, inovasi mendorong perubahan mendasar dalam kelembagaan, baik dari segi struktur formal maupun kultur organisasinya.

Dari sisi pembangunan ekonomi, upaya inovatif di sektor pemerintahan turut berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta Indeks Ekonomi Pembangunan Inklusif (Hilmawan et al., 2023). Pada beberapa daerah di Indonesia, penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dan reformasi tata kelola keuangan daerah telah

membuka peluang efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah yang melakukan inovasi cenderung memiliki struktur kelembagaan yang lebih ramping, namun tetap efektif. Restrukturisasi kelembagaan yang terjadi meliputi penggabungan atau penghapusan unit-unit yang dianggap kurang efisien, serta penguatan unit-unit yang berperan krusial dalam pengembangan inovasi. Proses ini pada gilirannya memerlukan perumusan regulasi yang lebih adaptif, serta penyesuaian budaya birokrasi yang lebih terbuka dan fleksibel.

Inovasi dalam tata kelola pemerintahan secara langsung berdampak pada perbaikan efisiensi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Lestari & Santoso, 2022). Inovasi teknologi semisal e-government dan e-procurement dapat mengurangi peluang korupsi karena proses pengadaan dan administrasi lebih mudah diawasi. Namun, penerapan inovasi ini acap kali membutuhkan penyesuaian struktural berupa pembentukan tim pengelola sistem elektronik, perumusan SOP baru, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat. Di sinilah terjadi interaksi kuat antara inovasi dan restrukturisasi kelembagaan, di mana penciptaan dan penerapan inovasi menuntut perubahan kelembagaan, sementara perubahan kelembagaan menjadi prasyarat agar inovasi dapat diterapkan secara efektif.

Di sisi lain, Mulgan dan Albury (2003) menjelaskan bahwa inovasi sektor publik tidak semata-mata berarti penerapan teknologi baru, tetapi juga melingkupi pembaruan proses dan struktur pemerintahan. Dengan kata lain, inovasi pemerintahan mensyaratkan kombinasi antara adopsi teknologi, reformasi birokrasi, dan pembentukan budaya kerja yang pro-perubahan. Ketika sebuah instansi pemerintah memutuskan untuk mengadopsi e-budgeting, misalnya, hal tersebut tidak hanya sekadar memasang perangkat lunak, tetapi juga menuntut pergeseran paradigma tentang tata kelola keuangan, reorientasi tugas dan fungsi bagian keuangan, serta pengembangan kapasitas SDM yang mampu mengoperasikan dan menganalisis data keuangan secara digital (Zarnelly, 2017; Khotimah & Astuti, 2020). Perubahan-perubahan ini pada akhirnya membentuk proses restrukturisasi kelembagaan yang lebih luas dan mendasar.

Pengelolaan pengetahuan (knowledge management) juga menjadi elemen vital dalam menjaga keberlanjutan inovasi di sektor pemerintahan. Melalui sistem pengelolaan pengetahuan yang baik, berbagai praktik terbaik (best practices) dari suatu daerah dapat ditularkan ke daerah lain, sehingga mempercepat proses pembelajaran dan meminimalkan pengulangan kesalahan (Banabera, 2019). Namun, hal ini memerlukan struktur kelembagaan yang mendukung proses dokumentasi, evaluasi, dan diseminasi pengetahuan. Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan sering kali tak terelakkan, termasuk pembentukan unit khusus yang mengelola pengetahuan atau pengintegrasian fungsi-fungsi tersebut ke dalam instansi yang telah ada. Dalam praktiknya, pemerintah daerah yang berhasil mengelola pengetahuan akan lebih siap melakukan replikasi inovasi, memperluas dampaknya, serta menjaga keberlanjutan inisiatif yang sudah berjalan.

Pada tataran yang lebih teknis, inovasi digital seperti e-governance, e-budgeting, dan e-procurement memicu perubahan radikal dalam bagaimana birokrasi beroperasi. Struktur organisasi yang sebelumnya vertikal dan hierarkis mulai mengalami transformasi menuju model yang lebih kolaboratif dan terbuka. Semisal pada penerapan e-procurement, proses pengadaan yang transparan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk Inspektorat, Bappeda, dan Dinas terkait lainnya, di mana koordinasi harus terjalin erat dan waktu respons dituntut lebih cepat. Hal ini secara alamiah menggugah kebutuhan akan restrukturisasi lembaga, karena struktur lama yang silo-based atau sektoral sering kali menghambat kelancaran arus informasi dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, inovasi digital tidak

hanya mendorong perbaikan proses kerja, tetapi juga mengarahkan birokrasi menuju reformasi kelembagaan yang lebih adaptif.

Inovasi pemerintahan juga terkait erat dengan restrukturisasi kelembagaan melalui penguatan budaya kewirausahaan di sektor publik (Karyotakis et al., 2015). Dalam kebanyakan sistem birokrasi, sikap inovatif sering kali dihambat oleh ketidakberanian mengambil risiko dan tuntutan akan kepastian regulasi. Namun, konsep kewirausahaan publik menekankan pentingnya kreativitas, inisiatif, dan keberanian untuk melakukan eksperimen kebijakan. Untuk mewujudkan hal ini, kelembagaan pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dengan memberi ruang bagi pegawai atau tim khusus untuk mengembangkan ide-ide baru. Misalnya, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah membentuk "laboratorium inovasi" atau "unit inovasi" yang bertugas mengeksplorasi metode baru dan mengujicobakan berbagai gagasan kreatif. Pembentukan unit semacam ini juga menuntut perubahan dalam pola rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja pegawai, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari restrukturisasi kelembagaan.

Dalam tataran proses restrukturisasi kelembagaan, perubahan mindset dan budaya birokrasi turut menjadi tantangan utama. Birokrasi tradisional kerap ditandai dengan hierarki yang kaku, prosedur yang berbelit, dan etos kerja yang kurang adaptif. Inovasi, di sisi lain, menuntut fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, dan orientasi hasil yang jelas (Henriyani, 2019). Oleh karena itu, penerapan inovasi pemerintahan hanya akan efektif bila diikuti oleh perubahan pola pikir dan perilaku pegawai negeri sipil (PNS). Rotasi pegawai yang sering terjadi, keterbatasan anggaran, serta motivasi dan disiplin yang menurun dapat menjadi penghambat serius. Restrukturisasi kelembagaan, dalam hal ini, harus mencakup perbaikan mekanisme penempatan pegawai, sistem insentif yang lebih mendorong prestasi, serta penguatan pengawasan internal.

Lebih jauh, digitalisasi pemerintahan memunculkan peluang peningkatan kompetensi SDM dan efisiensi proses kerja. Namun, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia dan resistensi pegawai yang terbiasa dengan sistem manual menuntut pendekatan restrukturisasi yang komprehensif (Rahardi et al., 2020). Pemerintah tidak hanya perlu membangun pusat data dan jaringan komunikasi, tetapi juga merumuskan kerangka regulasi yang mendukung inovasi digital. Ini mencakup standar keamanan data, kerahasiaan informasi, dan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual (Kondratenko et al., 2020). Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan harus meluas hingga mencakup pembentukan divisi khusus keamanan siber dan penanganan data, pelatihan berkesinambungan bagi pegawai, serta pembaruan aturan kelembagaan yang menyesuaikan perkembangan teknologi.

Inovasi pemerintahan dalam perspektif New Public Management (NPM) yang menyertai restrukturisasi kelembagaan diarahkan pada pencapaian hasil (outcomes) yang lebih maksimal dan efisien (El Ammar & Profiroiu, 2020). Penerapan sistem kinerja berbasis hasil (performance-based) dan transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan elemen-elemen NPM yang kian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai level. Dengan mengukur kinerja unit kerja berdasarkan indikator yang terstandar, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi titik lemah dan melakukan penyesuaian struktur. Akhirnya, proses restrukturisasi ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa formasi kelembagaan, proses bisnis, dan kultur organisasi selaras dengan sasaran strategis pembangunan nasional maupun daerah.

Sebagai contoh konkret, penerapan e-budgeting di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya mempercepat proses penyusunan dan pengawasan anggaran, tetapi juga menuntut perubahan kelembagaan. Tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, serta Bappeda menjadi semakin terintegrasi, sementara mekanisme

koordinasi dan pelaporan juga harus diperbarui agar sesuai dengan sistem digital (Khotimah & Astuti, 2020). Hasilnya, tingkat transparansi dan partisipasi publik meningkat, karena data anggaran dapat diakses secara real-time dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan. Namun demikian, implementasi e-budgeting masih menghadapi tantangan kapasitas SDM yang belum merata, terutama di daerah-daerah yang minim sumber daya manusia terampil di bidang teknologi. Hal ini memperkuat argumen bahwa inovasi tidak dapat dilepaskan dari restrukturisasi kelembagaan. Pemerintah harus menata ulang formasi dan kualifikasi pegawai, bahkan mungkin menambah atau memindahkan personel untuk mengisi posisi strategis yang baru di dalam struktur organisasi.

Restrukturisasi kelembagaan yang dihasilkan oleh inovasi pemerintahan juga dapat meningkatkan daya saing suatu daerah atau negara di kancah global. Tingkat daya saing suatu negara sering kali ditentukan oleh kemampuan pemerintahnya dalam merespons perubahan ekonomi global, menyediakan fasilitas dan layanan publik yang efisien, serta membangun infrastruktur fisik dan digital yang memadai (Henriyani, 2019). Ketika inovasi di sektor publik diimplementasikan secara luas, hal ini dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam jangka panjang, restrukturisasi kelembagaan yang mendukung inovasi akan berdampak pada peningkatan produktivitas, penurunan biaya operasional, serta terciptanya stabilitas sosial dan politik yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses restrukturisasi kelembagaan akibat inovasi juga berpotensi menimbulkan friksi dan resistensi, terutama apabila perubahan tersebut dipandang sebagai ancaman oleh sebagian pegawai atau pemangku kepentingan. Di sinilah pentingnya perumusan strategi komunikasi dan manajemen perubahan (*change management*) yang efektif. Pemerintah perlu menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat dari inovasi dan restrukturisasi kelembagaan secara komprehensif, sehingga seluruh lapisan organisasi dapat memahami urgensi perubahan yang dilakukan. Pelibatan stakeholder, baik dari kalangan internal birokrasi maupun masyarakat sipil, akan membantu menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan dukungan terhadap program inovasi pemerintahan (Banabera, 2019).

Pada uraian fenomena tersebut jelas bahwa inovasi pemerintahan di Indonesia bukan hanya sekadar menambahkan aplikasi digital atau memperbarui prosedur pelayanan publik, melainkan sebuah proses yang berdampak langsung pada struktur organisasi dan budaya kerja birokrasi. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa upaya inovasi terintegrasi dengan restrukturisasi kelembagaan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, sementara pemerintah pusat dapat memberikan standar dan bimbingan umum agar inovasi berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Namun demikian, kesuksesan inovasi pemerintahan dan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia masih harus menghadapi berbagai kendala. Masalah kesenjangan kompetensi pegawai, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan strategis yang komprehensif, mulai dari pengembangan SDM, perbaikan sistem insentif, hingga penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Inovasi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan politik, anggaran, dan komitmen lintas sektoral yang kuat, agar tidak hanya menjadi program jangka pendek yang terhenti saat terjadi pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan hal tersebut penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi kelembagaan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas berbagai bentuk inovasi yang telah diimplementasikan

serta konsekuensi yang timbul dari restrukturisasi kelembagaan tersebut, termasuk dalam hal efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena sesuai untuk memberikan gambaran mendalam dan komprehensif tentang pengaruh inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi kelembagaan pemerintah di Indonesia. Menurut Neuman (2014), pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta secara akurat, faktual, dan sistematis, serta menjelaskan hubungan yang terdapat di antara fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjabarkan kondisi faktual secara terperinci serta menganalisis perubahan dalam proses restrukturisasi kelembagaan sebagai dampak dari berbagai bentuk inovasi pemerintahan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dua cara utama, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melihat secara langsung praktik implementasi inovasi di berbagai institusi pemerintah, baik di tingkat pusat (kementerian) maupun di tingkat daerah (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota). Untuk melengkapi temuan observasi, metode dokumentasi dipilih sebagai sumber data sekunder yang kaya dan bervariasi. Dokumentasi yang diakses meliputi berbagai dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, artikel jurnal ilmiah, dan berita-berita di media massa (terutama media daring) yang membahas inovasi pemerintahan. Selain itu, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai dampak inovasi pemerintahan terhadap indikator kinerja kelembagaan di tingkat nasional maupun daerah. Melalui metode dokumentasi ini, peneliti memperoleh data historis, legal, dan empiris yang dibutuhkan untuk menyusun kerangka analisis yang komprehensif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengikuti tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data yang relevan dengan masalah penelitian dipilih dari keseluruhan data yang terkumpul, sehingga informasi menjadi lebih terfokus dan terorganisir. Setelah data berhasil direduksi, peneliti menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk mengungkapkan hubungan antarvariabel dan mempermudah interpretasi. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyatukan temuan-temuan yang telah dianalisis, sehingga peneliti dapat merumuskan interpretasi yang sistematis dan konsisten terkait hubungan antara inovasi pemerintahan dan restrukturisasi kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan

Globalisasi telah menjadi katalisator utama dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk sektor publik. Di Indonesia, inovasi pemerintahan telah menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Globalisasi telah memberikan dorongan kuat terhadap perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Terintegrasinya negara dalam sistem ekonomi global memaksa pemerintah untuk lebih inovatif dalam menangani tantangan yang muncul, seperti tuntutan akan transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi digital menjadi salah satu langkah paling efektif yang diambil oleh pemerintah. Data yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil melalui program *Palapa Ring*. Hingga tahun 2023, sekitar 78,19% dari populasi Indonesia sudah terjangkau

layanan internet (<https://apjii.or.id/>, 2024), meskipun masih ada kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Implementasi ini telah mempercepat transformasi digital dalam berbagai sektor, terutama dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, meskipun dampak positif dari globalisasi terhadap inovasi pemerintahan telah terlihat, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah ketimpangan teknologi antara wilayah yang sudah berkembang dan wilayah yang masih tertinggal, seperti di Papua, NTT, dan Maluku, di mana tingkat penetrasi internet masih di bawah 75%.

Inovasi Digital dalam Pelayanan Pemerintahan

Inovasi pemerintahan yang mendorong penggunaan teknologi informasi seperti e-government dan sistem pelayanan terpadu (SPT) telah berkontribusi terhadap restrukturisasi kelembagaan dengan mengurangi beban birokrasi manual. Proses yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen fisik dan koordinasi antar instansi kini dapat disederhanakan melalui platform digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pelayanan, tetapi juga menekan biaya operasional pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah secara aktif mendorong digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Program-program seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement telah diimplementasikan di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Misalnya, Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, telah mengimplementasikan program *Jakarta Smart City* yang menggunakan teknologi untuk mengelola transportasi, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, keberhasilan penerapan inovasi digital ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah-daerah maju seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dibandingkan dengan daerah-daerah tertinggal. Indikator ini dapat dilihat dari rasio penggunaan aplikasi layanan publik digital yang lebih rendah di daerah terpencil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inovasi digital telah membantu memperbaiki efisiensi layanan, ada tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan kapabilitas teknologi di beberapa daerah.

Tabel 1

Perbandingan Data Penetrasi Daerah Maju dan Daerah Tertinggal

Provinsi	Penetrasi Internet (%)
DKI Jakarta	86,96
Jawa Barat	82,73
Jawa Timur	81,26
Papua	69,91
NTT	72

Sumber: diolah dari data BPS, 2023

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa meskipun penetrasi internet cukup tinggi di sebagian besar wilayah penetrasi internet masih rendah di daerah-daerah seperti Papua dan NTT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana sudah tersedia, ada faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah daerah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi digital.

Salah satu inovasi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan di Indonesia adalah penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement*. Sistem

ini memungkinkan proses penyusunan dan pengelolaan anggaran publik menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Sistem *e-budgeting* telah berhasil diterapkan di lebih dari 75% pemerintah daerah, dan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini terlihat dari peningkatan penyerapan anggaran yang lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, penerapan *e-budgeting* telah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan rata-rata penyerapan anggaran mencapai 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang belum mengadopsi sistem serupa. Namun, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem digital ini. Masalah seperti ini menyebabkan lambatnya adopsi di beberapa daerah, terutama di wilayah timur Indonesia. Di samping itu, resistensi dari beberapa pejabat lokal yang sudah terbiasa dengan sistem manual juga menjadi hambatan dalam penerapan penuh inovasi digital.

Inovasi dalam sektor pemerintahan Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Reformasi ini melibatkan perubahan struktural, pembaruan proses, serta pengembangan sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui pengembangan *Smart ASN* yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) dalam menghadapi era digital. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital masih bervariasi. ASN generasi muda, terutama generasi milenial, cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibandingkan ASN yang lebih senior. ASN berusia di bawah 35 tahun merasa nyaman menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan sehari-hari, sementara hanya 45% ASN berusia di atas 50 tahun yang merasa hal yang sama. Kesenjangan kompetensi ini menjadi tantangan utama dalam upaya mempercepat transformasi digital di kalangan birokrasi.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Inovasi dalam otonomi daerah, memberikan dorongan signifikan bagi pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Inovasi tersebut sering kali dilihat sebagai bagian dari transformasi governance yang lebih luas, di mana terdapat interaksi antara desentralisasi, otonomi daerah, dan upaya meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik.

Inovasi dalam pemerintahan yang berujung pada restrukturisasi kelembagaan di tingkat daerah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi pelayanan publik. Desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki otonomi lebih besar telah memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyesuaikan organisasi mereka sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Desentralisasi yang mulai diperkuat melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui hingga yang terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memberi pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Di sisi kelembagaan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kebebasan untuk membentuk, mengubah, dan menghapus dinas-dinas yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ini terlihat dalam beberapa perubahan struktur organisasi daerah setelah pemberlakuan otonomi daerah, termasuk pembentukan dinas-dinas khusus seperti Dinas Pariwisata di beberapa provinsi yang memiliki potensi pariwisata besar seperti Bali dan Yogyakarta.

Restrukturisasi kelembagaan ini juga menekankan pada penerapan prinsip-prinsip "good governance" yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap masyarakat. Dengan inovasi dalam teknologi digital, banyak pemerintah daerah mulai

mengadopsi sistem e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi birokrasi. Langkah ini, misalnya, terlihat dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan transparan. Berikut ini adalah data dari beberapa pemerintah daerah yang telah melakukan restrukturisasi kelembagaan sebagai bagian dari inovasi dalam pemerintahan di era otonomi daerah:

Tabel 2
 Data Restrukturisasi Kelembagaan Pada Beberapa Pemerintah Daerah

Daerah	Tahun Restrukturisasi	Perubahan Kelembagaan	Keterangan
Provinsi Jawa Barat	2021	Pembentukan Dinas Digital dan Informasi	Fokus pada pengembangan layanan digital dan implementasi e-government
Kabupaten Sidoarjo	2020	Restrukturisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penggabungan beberapa dinas untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam sektor pertanian
Provinsi Sumatera Barat	2017	Pembentukan Dinas Kebudayaan	Fokus pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata lokal sebagai sektor unggulan daerah
Kota Surabaya	2024	Restrukturisasi Tipe kelembagaan daerah	Fokus pada Restrukturisasi dan penyesuaian Tipe kelembagaan Dinas, Badan

Sumber: Data diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah dan media massa online.

Meskipun restrukturisasi kelembagaan ini menawarkan fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, tantangan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam memodernisasi struktur organisasi mereka karena keterbatasan kemampuan fiskal dan kendala teknis dalam implementasi teknologi digital.

Restrukturisasi juga sering kali menghadapi resistensi dari pejabat birokrasi lokal yang enggan terhadap perubahan. Studi menunjukkan bahwa di beberapa daerah, proses inovasi dan restrukturisasi justru terganggu oleh birokrasi yang masih tradisional dan tidak adaptif terhadap inovasi (Turner, M dkk 2019, Damanhuri, D., & Jawandi, R. 2017, Radiansyah, 2020).

Namun, di sisi lain, daerah yang berhasil melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Sebagai contoh, Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan Smart City, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada warganya.

Daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintahan. Menurut data dari Kementerian PPN/Bappenas, daerah-daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital dalam pelayanan publik, menunjukkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) regional yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain.

Tabel 3
 Data PDB dan Tingkat Implementasi Inovasi Daerah Maju dan Daerah Tertinggal

Daerah Provinsi	Pertumbuhan PDB (%) 2023	Tingkat Implementasi Inovasi (%)
DKI Jakarta	4,96	85
Jawa Barat	5,00	80
Jawa Tengah	4,98	75
NTT	3,52	45
Papua Barat	3,91	40

Sumber : Diolah dari BPS 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada korelasi positif antara tingkat implementasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang lebih maju. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan merata, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mendorong inovasi di daerah-daerah yang tertinggal, terutama di wilayah timur Indonesia. Hubungan antara tingkat implementasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah maju menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Daerah yang lebih maju secara ekonomi cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengadopsi inovasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi mereka lebih jauh. Inovasi memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, serta daya saing suatu wilayah. Hal ini terjadi karena daerah-daerah maju memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan kebijakan yang progresif dari pemerintah lokal maupun pusat.

Meskipun ada korelasi positif antara inovasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah maju, tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah tertinggal, khususnya di wilayah timur Indonesia, jauh lebih kompleks. Wilayah ini seringkali memiliki keterbatasan dalam hal akses infrastruktur dasar, pendidikan, teknologi, serta dukungan finansial untuk mendorong inovasi. Dengan demikian, meskipun inovasi terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, daerah-daerah yang tertinggal sering kali sulit untuk memanfaatkannya secara maksimal karena kendala-kendala struktural yang ada.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan upaya dalam mendorong inovasi di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah pusat dapat memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk kebijakan yang tepat sasaran, investasi infrastruktur, dan program pengembangan sumber daya manusia yang terfokus pada wilayah-wilayah yang tertinggal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Ini bisa mencakup pengembangan kawasan industri berbasis teknologi, penguatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di daerah, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang inovatif. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja di wilayah tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian berbasis inovasi.

Selain intervensi dari sisi kebijakan dan infrastruktur, penting juga untuk memperkuat budaya inovasi di tingkat lokal. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengembangan solusi inovatif yang sesuai dengan konteks

dan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, inovasi dalam bidang agrikultur di wilayah timur Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dapat berfokus pada teknologi ramah lingkungan yang meningkatkan hasil panen tanpa merusak ekosistem lokal.

Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal dari daerah tertinggal. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pasar nasional dan internasional melalui platform digital, produk-produk inovatif dari daerah-daerah tersebut dapat bersaing dengan produk dari daerah yang lebih maju. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Inovasi dalam pemerintahan, terutama dalam pengenalan teknologi informasi, telah mengubah secara signifikan cara kerja dan struktur kelembagaan di Indonesia. Pada bidang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyesuaian struktur kelembagaan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan restrukturisasi unit kerja dan pengenalan mekanisme baru, seperti aplikasi digital untuk pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas

Penyesuaian Struktur Kelembagaan dalam Pemerintahan

Inovasi dalam pemerintahan, terutama melalui penerapan teknologi digital, telah mendorong restrukturisasi kelembagaan di Indonesia. Penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini sangat bergantung pada kesiapan institusi untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan keterbukaan terhadap perubahan. Kolaborasi lintas lembaga yang lebih baik dan penerapan teknologi digital yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Restrukturisasi kelembagaan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sering kali melibatkan pembentukan unit-unit baru yang berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Misalnya, beberapa kementerian telah membentuk divisi khusus yang menangani sistem informasi dan pelayanan berbasis digital. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Ditjen Bina Bangda untuk memfasilitasi pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bertujuan dalam mengatur proses data pembangunan daerah, mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pengenalan teknologi baru juga memicu efisiensi melalui penggabungan beberapa unit kerja yang memiliki fungsi serupa. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, tetapi juga untuk mengurangi duplikasi fungsi dan meningkatkan koordinasi antar-unit di dalam lembaga. Sebagai contoh, restrukturisasi di Kementerian Keuangan melibatkan penggabungan beberapa direktorat yang berfokus pada pengelolaan anggaran dan keuangan negara untuk mendukung implementasi sistem e-budgeting.

Konsep *good governance* menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan. Inovasi seperti e-budgeting, e-procurement, dan aplikasi pelayanan publik berbasis daring tidak hanya mengubah cara pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya transparansi yang lebih baik melalui sistem digital, masyarakat dapat mengawasi proses pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara langsung, sehingga memperkecil potensi terjadinya korupsi.

Misalnya, penerapan sistem e-budgeting di DKI Jakarta telah memungkinkan publik untuk mengakses rincian alokasi anggaran melalui portal terbuka yang dapat diakses secara daring. Hal ini secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengadopsi sistem serupa, yang tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses perencanaan dan penganggaran.

Restrukturisasi kelembagaan juga telah mendorong peningkatan sinergi antar lembaga, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor. Kasus penanganan bencana alam merupakan contoh yang baik dari peningkatan koordinasi antar lembaga setelah adanya inovasi dalam pemerintahan. Sebagai contoh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sering bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan dalam mengkoordinasikan bantuan dan respons cepat selama terjadi bencana. Restrukturisasi yang dilakukan di tingkat kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi yang memiliki peran penting dalam manajemen krisis.

Data dari BNPB menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang kuat telah mempercepat waktu respons bencana dan meningkatkan efektivitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Dalam beberapa tahun terakhir, BNPB juga telah mengadopsi sistem digital berbasis geografis untuk memantau risiko bencana secara real-time, yang memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan akurat dengan instansi terkait.

Walaupun restrukturisasi kelembagaan memberikan banyak manfaat, tantangan yang dihadapi termasuk resistensi dari birokrasi yang sudah ada. Banyak lembaga pemerintah yang memiliki budaya organisasi yang cenderung statis dan tidak siap menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan inovasi teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki infrastruktur digital yang terbatas.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor pemerintahan di Indonesia, terutama yang terkait dengan penerapan teknologi digital, memberikan dampak signifikan terhadap restrukturisasi kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mulgan dan Albury (2003) yang menyebutkan bahwa inovasi sektor publik tidak sebatas pada penerapan teknologi baru, tetapi juga menyangkut perubahan proses, struktur, dan budaya organisasi. Di Indonesia, proses transformasi ini menjadi semakin menonjol sejak bergulirnya era globalisasi, yang menuntut pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penetrasi internet yang meningkat di berbagai wilayah memudahkan pemerintah untuk menerapkan e-government, e-budgeting, dan e-procurement. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal seperti Papua, NTT, dan Maluku, yang belum memiliki infrastruktur digital memadai.

Fenomena ini mendukung studi terdahulu yang menegaskan bahwa kesenjangan digital (digital divide) memiliki dampak langsung terhadap ketimpangan akses layanan publik (Zheng et al., 2019). Di satu sisi, daerah-daerah maju seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat mendapatkan manfaat besar dari inovasi digital karena infrastruktur mereka relatif siap, sehingga proses restrukturisasi kelembagaan berjalan efektif. Di sisi lain, daerah-daerah tertinggal mengalami kendala baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun penyiapan infrastruktur teknologi. Kondisi tersebut dikonfirmasi pula oleh data BNPB yang menunjukkan bahwa penanganan bencana alam di wilayah dengan ketersediaan teknologi terbatas kurang mendapatkan dukungan sistem digital berbasis geografis secara optimal. Akibatnya, meskipun ada peluang untuk melakukan

kolaborasi lintas sektor yang lebih cepat, hasilnya belum sepenuhnya tercapai di wilayah-wilayah tersebut.

Sementara itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai pilar pendukung inovasi. Upaya seperti pembentukan unit-unit baru yang berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penyesuaian struktur kelembagaan. Namun, sesuai dengan teori perubahan kelembagaan (*institutional change theory*), perubahan struktural hanya akan berhasil jika disertai dengan perubahan norma, budaya, dan perilaku birokrasi (North, 1990). Fakta bahwa masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) senior yang enggan mengadopsi teknologi digital menegaskan perlunya pendekatan pelatihan dan pendampingan yang sistematis. Hal ini juga diperkuat oleh temuan BKN bahwa tingkat kesiapan ASN di atas 50 tahun jauh lebih rendah dibandingkan ASN milenial. Strategi Smart ASN hanya akan memberikan hasil optimal jika manajemen perubahan (*change management*) dapat diimplementasikan secara konsisten.

Terdapat hubungan positif antara tingkat implementasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah maju menunjukkan bahwa inovasi memang dapat menjadi motor peningkatan produktivitas dan efisiensi (Hilmawan et al., 2023). Namun, untuk mencapai pembangunan yang inklusif, perlu ada kebijakan dan program yang terintegrasi untuk mendorong inovasi di daerah tertinggal. Pembentukan ekosistem inovasi yang kuat di wilayah timur Indonesia, misalnya, memerlukan kolaborasi yang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Kerja sama ini dapat meliputi pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi di bidang litbang (penelitian dan pengembangan), serta dukungan pembiayaan untuk UMKM lokal. Selain itu, penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan pendidikan berorientasi industri 4.0 menjadi elemen kunci agar masyarakat daerah tertinggal dapat turut serta memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Berdasarkan uraian hasil tersebut, pentingnya merespons perubahan sosial-politik yang cepat melalui kolaborasi lintas lembaga. Prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, semakin diakselerasi oleh penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement*. Pemerintah daerah yang menerapkan sistem ini secara penuh, seperti di Jakarta dan Jawa Barat, telah menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik. Namun, tanpa koordinasi yang memadai antarinstansi, upaya tersebut tidak akan berdampak signifikan. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa resistensi pejabat lokal, budaya birokrasi yang terlalu hierarkis, serta kurangnya harmonisasi regulasi sering kali menghambat restrukturisasi kelembagaan. Karena itu, pemerintah pusat perlu merumuskan kebijakan yang mensinergikan tata kelola digital antarinstansi, sekaligus memberikan dukungan insentif kepada daerah yang siap melakukan perubahan kelembagaan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, beberapa rekomendasi konkret dapat disampaikan. Pertama, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu menetapkan peta jalan (*roadmap*) pembangunan infrastruktur digital yang difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal, lengkap dengan target waktu dan indikator capaian yang jelas. Kedua, penyiapan SDM melalui program Smart ASN perlu ditingkatkan, khususnya dengan modul pelatihan digital yang komprehensif dan mekanisme pendampingan intensif bagi ASN senior. Ketiga, pemerintah perlu membangun mekanisme insentif bagi pemerintah daerah yang sukses mengimplementasikan inovasi digital secara efektif. Insentif tersebut dapat berupa tambahan dana alokasi khusus (DAK) atau pengakuan prestasi kelembagaan yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja daerah. Keempat, perlu ada penguatan kerangka regulasi yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan lembaga, misalnya melalui integrasi sistem informasi antarpemerintah (*interoperabilitas*). Hal ini akan mencegah munculnya data silo yang menghambat transparansi dan koordinasi. Terakhir, upaya memupuk budaya inovasi di daerah tertinggal harus didorong dengan melibatkan masyarakat lokal dalam

proses desain dan implementasi inovasi, sehingga solusi yang dihasilkan betul-betul relevan dan berkelanjutan.

Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan inovasi digital di Indonesia dapat berjalan lebih merata, tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah-daerah maju, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi wilayah-wilayah tertinggal. Selain itu, restrukturisasi kelembagaan yang bersifat adaptif dan kolaboratif akan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan, sehingga Indonesia lebih siap menghadapi tantangan era globalisasi dan persaingan ekonomi digital di masa depan. Prinsip good governance dan semangat reformasi birokrasi yang mendasari proses inovasi ini perlu dijaga secara konsisten untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Globalisasi telah mendorong inovasi dalam pemerintahan Indonesia, terutama melalui digitalisasi layanan publik dan restrukturisasi kelembagaan. Inovasi digital, seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement, telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Inovasi dalam pemerintahan Indonesia telah membawa perubahan positif, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan. Meski penetrasi teknologi di wilayah maju seperti Jakarta dan Jawa Barat cukup tinggi, ketimpangan akses teknologi di daerah tertinggal, seperti Papua dan NTT, menjadi tantangan signifikan. Selain itu, kendala dalam kesiapan sumber daya manusia dan resistensi birokrasi tradisional memperlambat adopsi inovasi di beberapa daerah. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui pengembangan Smart ASN untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menghadapi era digital. Namun, kesenjangan adaptasi teknologi antar generasi ASN menjadi hambatan tersendiri. Inovasi pemerintahan telah memungkinkan pemerintah daerah melakukan restrukturisasi kelembagaan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal. Beberapa daerah, seperti Surabaya dan Jakarta, berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, daerah tertinggal masih menghadapi kesulitan dalam memodernisasi struktur organisasinya karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mempersempit kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal guna mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif.

Daftar Pustaka

- Banabera, G. (2019). Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 203-212. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.667>
- Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017). Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*, 297-304, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/297-304/1729>
- El Ammar, C., Profiroi, C. M. (2020). Innovation in public administration reform: a strategic reform through NPM, ICT, and e-governance. A comparative analysis between Lebanon and Romania. *Administratie si Management Public*, 35, 75-89, DOI: 10.24818/35-05
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>

- Henriyani, Etih, (2019) Menumbuhkan Budaya Birokrasi Yang Inovatif Dan Berdaya Saing Global, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 6, No 2, <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2255>
- Indriati, Betty; Supardal Supardal, (2023), Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman, *Rural and Regional Government*, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i1.300>
- Karyotakis, K., Bakatsaki, M., Moustakis, V. (2015). The entrepreneurial facets of public administration. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-327-331
- Khotimah, Nurul dan Astuti, Sunu Retno (2018) Penerapan Sistem e-Budgeting Sebagai bentuk Pemanfaatan Teknologi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0. ISBN: 978-602-73470-5
- Kondratenko, V., Okopnyk, O., Ziganto, L., & Kwilinski, A. (2020). Innovation Development of Public Administration: Management and Legislation Features. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 87-94. <https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-06>
- Lestari, R.A., & Santoso, A. (2022). PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE. *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 2, No. 1, <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). **Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook** (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Boston: Allyn and Bacon. <http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf> hlm 38-39.
- Noeridha, N. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 1, 32-46, <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i1.116>
- Rahardi, Hafizh F., Ajeng, T.D.B.A dan Patotaruno, Y Maudi. 2014. Spoil System Sebagai Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Digitalisasi. Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". Hal : 1378-1401
- Rahayu, S.D., Rofieq, A., Aini, N., & Arifudin, A. (2023). Implementation Of E-Open Application As A Strategic Innovation Of Public Services In The Pandemic Covid 19 Era In Bekasi. *VERITAS*, Vol 9 No 1, 122-136, <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2554>
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2019). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Zarnelly. (2017). Sistem Informasi E-budgeting Menggunakan Pendekatan Berorientasi Objek (Studi Kasus: Uin Suska Riau). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 70–77. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/download/3449/2056>